

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Kamri. *Hak asasi manusia: hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Refika Aditama, 2007.
- Andi Sofyan, Abd Asis, dan Amir Ilyas. *Hukum acara pidana: suatu pengantar*. Ed. 1, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. “Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek,” 2010.
- Ashar, Dio. *Access to justice index in Indonesia 2019: Civil Society Consortium for Access to Justice Index in Indonesia*. Second edition. Jakarta, Indonesia: Indonesia Judicial Research Society, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- . “Pengantar ilmu hukum tata negara,” 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem peradilan pidana kontemporer*, 2010.
- . *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Eresco, 1996.

Nawawi Arief, Barda. “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),” 2011.

Bloom, Robert M. *Criminal Procedure: the Constitution and the Police*. Aspen Publishers, 2006.

Butt, Simon. *The constitutional court and democracy in Indonesia*. Brill, 2015.

Cook III, Julian A. *Inside investigative criminal procedure: what matters and why*. Aspen Publishing, 2012.

Eddyono, Supriyadi Widodo, Wahyudi Djafar, Sufriyadi, Erasmus AT Napitupulu, dan Sriyana. *Praperadilan di Indonesia: teori, sejarah dan praktiknya*. Institute for Criminal Justice Reform, 2014.

Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. MediaPressindo, 2018.

Erwin, Chemerinsky. “Constitutional Law: Principles and Policies,” 2015.

Frans Hendra Winarta, S. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat*. Elex Media Komputindo, 2011.

Gatot, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “Bantuan hukum: akses masyarakat marjinal terhadap keadilan (tinjauan sejarah,

- konsep, kebijakan, penerapan & perbandingan di berbagai negara),” 2007.
- Hamzah, Andi. “Hukum acara pidana Indonesia,” 2010.
- Harahap, M Yahya. “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan Edisi kedua,” 2002.
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-prinsip hukum pidana*, 2022.
- . “Teori dan hukum pembuktian,” 2013.
- Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum. “Panduan Bantuan Hukum Indonesia.” *Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*, 2014.
- Kasim, Ifdhal. “Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan.” *Jakarta: Elsam*, 2001.
- Kuantitatif, Pendidikan Pendekatan. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.” *Alfabeta, Bandung*, 2016.
- Lubis, T Mulya, dan Daniel S Lev. “Bantuan hukum dan kemiskinan struktural,” 1986.
- Lubis, Todung Mulya. “In search of human rights: Legal-political dilemmas of Indonesia’s new order, 1966-1990,” 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.” *Mertokusumo, Sudikno*, 2011.
- Marzuki, Suparman. *Tragedi Politik Hukum HAM*. Pustaka Pelajar, 2011.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Mulyadi, Lilik. "Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya," 2012.

———. *Hukum acara pidana: suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan*. Citra Aditya Bakti, 1996.

Nasution, Adnan Buyung. "bantuan hukum di Indonesia," 1981.

Nawawi Arief, Barda. *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media, 2018.

Nonet, Philippe, Philip Selznick, dan Robert A Kagan. *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge, 2017.

Orth, John V. *Due Process of Law—A Brief History*. University Press of Kansas, 2003.

Pangaribuan, Luhut MP. *Hukum acara pidana: surat resmi advokat di pengadilan praperadilan, eksepsi, pledoi, duplik, memori banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2013.

Prints, Darwan. *Hukum acara pidana: suatu pengantar*. Djambatan, 1989.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.

Rahardjo, Satjipto, dan Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. "Genta Publishing," 2009.

- Raharjo, Agus, A Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro. “Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat).” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2015): 432–44.
- Raharjo, Agus, dan Angkasa Angkasa. “Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 389–401.
- Reksodiputro, Mardjono. “Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,” 1997.
- Rhona, KM Smith. *Textbook on international human rights*. Oxford University Press, 2005.
- Satzburg, Stephen A, Daniel J Capra, dan David C Gray. *American criminal procedure: cases and commentary*. West Academic, 2022.
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum,” 2011.
- . “Pengantar penelitian hukum,” 2006.
- Soekanto, Soerjono, Heri Tjandrasari, dan Tien Handayani. “Bantuan hukum: suatu tinjauan sosio yuridis,” 1983.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2017.
- Sugono, Bambang. “Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers.” Syaufi, Ahmad. *Mediasi Penal Sebagai*

- Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Beraspek Perikatan*,
2011.
- Sunggono, Bambang. “Bantuan hukum dan hak asasi manusia,”
2009.
- Tribe, Laurence H. “American constitutional law,” 1978.
- Whitebread, Charles H, dan Christopher Slobogin. *Criminal
procedure: An analysis of cases and concepts*. Foundation
Press Eagan, MN, 2000.
- Winarta, Frans Hendra, dan Bantuan Hukum. “Pro Bono Publico.”
*Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan
Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Zulfa, Eva Achjani. “Pergeseran paradigma pemidanaan,” 2011.

B. Putusan

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015
- Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN.Bdg
- Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN.Sak
- Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN.Llg

C. Jurnal

- Bedner, Adriaan. “An elementary approach to the rule of law.”
Hague Journal on the rule of law 2, no. 1 (2010): 48–74.

Bethsyeba, Gabriella. "Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2013, 1–17.

Ervin Jr, Sam J. "Miranda v. Arizona: A Decision Based on Excessive and Visionary Solicitude for the Accused." *Am. Crim. LQ* 5 (1966): 125.

Fauzi, Suyogi Imam, dan Inge Puspita Ningtyas. "Optimalisasi pemberian bantuan hukum demi terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 1 (2018): 50–72.

Fuady, Munir, dan Aep Gunarsa. *Konsep negara demokrasi*. Refika Aditama, 2010.

Garner, Bryan A. "Black's Law Dictionary, Thomson Reuters, St." *Paul MN.*, 2009.

LaFave, Wayne, Jerold Israel, Nancy King, dan Orin Kerr. *Criminal Procedure, 5th, Hornbook Series, Student Edition, 2015 Pocket Part*. West Academic, 2015.

Raharjo, Agus, A Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 3 (2015): 432–44.

Raharjo, Agus, dan Angkasa Angkasa. “Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 389–401.

Resnik, Judith. “Uncovering, disclosing, and discovering how the public dimensions of court-based processes are at risk.” *Chi.-Kent L. Rev.* 81 (2006): 521.

Setyowati, Herning, dan Nurul Muchiningtias. “The Role of Advocates in Providing Legal Assistance to the Community in the Perspective of Human Rights.” *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 155–68.

D. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia);

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak

Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian
Negara Republik Indonesia;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019
tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun
2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga
Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun
2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum;

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum;

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana;

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
KUHP;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

E. Laporan Resmi

KontraS. “Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia Periode Juni 2021-Mei 2022,” Oktober 2024.

<https://kontras.org/laporan/situasi-praktik-penyiksaan-dan-perlakuan-atau-penghukuman-lain-yang-kejam-tidak-manusiawi-atau-merendahkan-martabat-manusia-di-indonesia-periode-juni-2021-mei-2022>

MaPPI FHUI. “Laporan Konferensi Nasional Bantuan Hukum II Dalam Rangka Perluasan Akses Keadilan Melalui Optimalisasi Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas,” 2019.

<https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Laporan-Konfenas-II-Bali.pdf>.

Satu Data Indonesia (SDI). “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jumlah Organisasi Bantuan Hukum,” Oktober 2024. https://katalog.data.go.id/id/kurasi_stages/jumlah-organisasi-bantuan-hukum.

———. “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: Jumlah
Penerima Bantuan Hukum Berdasarkan Jenis,” Oktober 2024.

https://katalog.data.go.id/dataset/jumlah-penerima-bantuan-hukum-berdasarkan-jenis/resource/14f53e5c-06da-43df-9710-8610e960c618?view_id=6a149967-aef1-4d72-839d-5e66522d0c54.

Sidbankum. “Data Statistik Bantuan Hukum,” 2024.

<https://sidbankum.bphn.go.id/>.